

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Setiap individu memiliki peran yang terkait dengan kehidupan sosialnya, baik itu dalam lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat secara umum. Dalam setiap lingkungan tersebut, setiap individu memiliki peran khusus yang sesuai dengan posisinya, contohnya dalam konteks lingkungan kerja Yayasan, terdapat peran-peran seperti direktur, staf, karyawan, dan lain sebagainya. Pembahasan ini akan memfokuskan pada peranan staf dalam konteks Yayasan. Sebelum menjelajahi lebih lanjut, penting untuk memahami definisi peran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran dapat diartikan sebagai tindakan dan pemenuhan hak serta kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukan atau statusnya yang dinamis. Perbedaan antara kedudukan dan peran memiliki tujuan dalam penelitian dan ilmu pengetahuan. Kedudukan dan peran saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya bergantung satu sama lain.

Teori peran, sebagai kombinasi teori, orientasi, dan disiplin ilmu, pertama kali muncul dan masih digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi. Grasss Massan dan A.W. McEacrhern, seperti yang dikutip oleh David Berry (2003), mendefinisikan peran sebagai sekelompok harapan yang diberlakukan kepada individu yang menduduki posisi sosial tertentu. Harapan-harapan ini muncul dari norma-norma sosial, sehingga peran-peran ini dapat dianggap sebagai hasil dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, individu diwajibkan untuk memenuhi tugas-tugas sesuai dengan harapan masyarakat dalam pekerjaan dan bidang lainnya. Dalam perspektif sosiologis, peran adalah aspek dinamis yang mencakup tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki atau memiliki posisi tertentu. Individu tersebut melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, dan ketika peran ini dilaksanakan dengan baik, diharapkan tindakan tersebut sesuai dengan harapan lingkungan sekitarnya. Secara umum, peran memainkan peran penting dalam kelangsungan suatu proses, mengubah keadaan statis menjadi dinamis, dan merupakan tugas atau pemberian tugas kepada individu atau kelompok orang.

Definisi peran menurut para ahli:

menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan.

Menurut Koentjoroningrat, 1986: 35. Dalam ranah ilmu antropologi dan ilmu sosial, peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang mencerminkan posisi tertentu.

Menurut Alvin L. Bertran, yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko, menyatakan bahwa peranan merupakan pola perilaku yang diinginkan dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2.1.1 Teori Peran (Role Theory)

merupakan sintesis dari berbagai teori orientasi dan disiplin ilmu. Istilah 'peran' diambil dari dunia teater, di mana seorang aktor harus menggambarkan karakter tertentu dan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan karakter tersebut. Selain itu, peran memiliki komponen-komponen berikut:

- a. Peran yang terlaksana (Enacted Role) adalah bagaimana seseorang benar-benar memerankan suatu peran.
- b. Peran yang diwajibkan (Prescribed Role) adalah tindakan yang diinginkan masyarakat agar dijalankan dalam suatu peran tertentu.
- c. Konflik peran (Role Conflict) adalah keadaan di mana seseorang menghadapi tuntutan dan tujuan peran yang bertentangan dalam satu atau lebih status yang diemban.
- d. Jarak peran (Role Distance) adalah cara pelaksanaan peran secara emosional.
- e. Kegagalan peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam memainkan peran tertentu.
- f. Model Peran (Role Model) adalah seseorang yang perilakunya kita contoh dan tiru.
- g. Sekelompok peran (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya saat dia memainkan perannya.
- h. Tekanan peran (Role Strain) adalah situasi yang muncul ketika seseorang kesulitan memenuhi harapan atau tujuan peran karena ada konflik internal yang saling bertentangan.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial melalui tindakan individu yang sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh budaya. Menurut teori ini, harapan-harapan peran adalah pandangan bersama yang membimbing perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah

perspektif lain diungkapkan oleh Livinson, sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang mengemukakan bahwa:

- a. Peranan mencakup norma-norma yang tercermin dalam posisi atau peran seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep mengenai tindakan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi masyarakat,
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memegang peranan penting dalam struktur sosial masyarakat.

Teori peran menggambarkan dinamika interaksi sosial dengan mengacu pada perilaku individu yang sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku. Teori ini menegaskan bahwa harapan-harapan terkait peran adalah pengertian bersama yang membimbing tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun Beberapa aspek mengenai peran adalah sebagai berikut:

- a. Peran sebagai sarana komunikasi. Peran dianggap sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintahan membutuhkan komunikasi efektif.
- b. Peran sebagai terapi, yaitu peran dianggap sebagai cara untuk mengatasi masalah-masalah psikologis masyarakat, seperti perasaan tidak berdaya, kurangnya kepercayaan diri, dan persepsi bahwa diri mereka bukan bagian penting dari masyarakat.
- c. Peran sebagai kebijakan, dimana pandangan ini menyatakan bahwa peran adalah suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk diimplementasikan.
- d. Peran sebagai strategi, dimana perspektif ini menganggap bahwa peran adalah suatu strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat."

2.2 Peran Perempuan

Dalam era globalisasi ini, panggung peluang membentang luas untuk seluruh warga negara tanpa memandang jenis kelamin, menawarkan jalan setara ke berbagai ranah kehidupan. Dengan jumlah kaum perempuan yang melimpah, mendalamnya perhatian dan pemberdayaan terhadap potensi mereka menjadi pilar utama dalam membantu membangun tanah air.

Kesetaraan peran dan posisi antara perempuan dan laki-laki menjadi fondasi kuat dalam meraih impian negara dan bersama-sama berjuang untuk kesejahteraan di semua sektor pembangunan (Suarmini, 2018).

Seiring berjalannya waktu, tuntutan masyarakat modern terhadap peran perempuan semakin mendalam, melibatkan berbagai aspek kehidupan mulai dari pendidikan, dimensi sosial ekonomi, hingga ranah hukum dan politik.

Semua ini tak terlepas dari desakan bangsa-bangsa, yang muncul atas nama persatuan global, menegaskan bahwa keberhasilan suatu bangsa kini diukur sejauh mana kepedulian dan pemberian akses yang meluas bagi perempuan untuk berkiprah di panggung publik. Itulah harmoni perubahan, panggung di mana kita, bersama-sama, menciptakan kemajuan dan kesetaraan yang abadi. Pada umumnya, di Indonesia, pembagian kerja antara lelaki dan perempuan mencerminkan peran perempuan. Awal dari pembagian kerja ini tidak diragukan lagi terkait dengan perbedaan peran lelaki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. Masyarakat menggambarkan peran yang dimainkan oleh perempuan, yang dapat dianalisis dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan domestik dan pekerjaan publik.

1. Peran Tradisional menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi, menjalankan tugas mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta memberikan dukungan kepada suami. Pembagian kerja yang jelas, dengan perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.
2. Peran Transisi menyeimbangkan peran tradisional dengan aspirasi gender, namun tetap mempertahankan harmoni dan tanggung jawab terhadap urusan rumah tangga oleh perempuan.
3. Dwiperan menempatkan perempuan dalam dua dunia, domestik dan publik, dengan kedua peran tersebut dianggap sama penting. Dukungan moral suami dapat menjadi pemicu keteguhan atau keengganan, yang dapat menimbulkan keresahan atau konflik terbuka.
4. Peran Egalitarian menuntut waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar rumah. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki menjadi kunci untuk menghindari konflik kepentingan dalam pembagian peran.
5. Peran Kontemporer mencerminkan pilihan perempuan untuk mandiri dalam kehidupan yang mandiri. Meskipun jumlahnya belum banyak, tekanan dominasi lelaki terhadap perempuan yang kurang peduli terhadap kepentingan perempuan dapat meningkatkan jumlahnya (Aida Vitalaya, 2010:145).

Dalam pengembangan kajian peran perempuan, konsep peran seks memberikan makna tersendiri. Peran seks merupakan seperangkat atribut dan ekspektasi yang terkait dengan perbedaan gender dalam masyarakat. Menurut teori fungsionalisme, peran seks merefleksikan norma sosial dan pola sosialisasi. Norma yang cenderung berubah dewasa ini menunjukkan evolusi hubungan antara laki-laki dan perempuan seiring dengan perkembangan konsep keluarga yang berkesetaraan (Nicholas Abercrombie, dkk. 2010: 501 dalam Ahdiah, 2013).

2.3 Yayasan

Menurut undang-undang Yayasan no.16 tahun 2001, Yayasan adalah suatu entitas hukum yang terdiri dari kekayaan yang terpisah dan didirikan untuk mencapai tujuan di bidang social seperti Pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan memiliki peran penting dalam kehidupan Masyarakat, membantu peningkatan kesejahteraan melalui Pendidikan. Selain itu, keberadaan Yayasan dapat membantu pencapaian tujuan Masyarakat di bidang social, baik yang bersifat kemanusiaan maupun keagamaan. Meskipun Yayasan diperbolehkan untuk menghasilkan keuntungan melalui berbagai usaha, namun keuntungan melalui berbagai usaha, namun keuntungan yang di dapatkan harus digunakan semata-mata untuk tujuan amal dan bukan untuk kepentingan pribadi. Yayasan memiliki peran dan juga fungsi, yaitu sebagai wadah nirlaba yang memajukan kesejahteraan manusia.

Selain itu, Yayasan juga memberikan perlindungan, bantuan, dan layanan social, keagamaan, dan kemanusiaan. Di dalam sebuah Yayasan terdapat organ-organ Yayasan yang secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaannya. Meskipun non-profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

Definisi Yayasan menurut para ahli:

Menurut Christine S.T. Kansil, yayasan atau stichting (Belanda) adalah sebuah entitas hukum yang bergerak di bidang sosial.

Menurut Soeroredjo (2005), yayasan memiliki sifat sosial, kemanusiaan, dan idealistik, dan tentunya tidak boleh melanggar peraturan hukum, ketertiban umum, dan moralitas.

Menurut Achmad Ichsan, pendiri yayasan bisa berupa pemerintah atau individu sipil, dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dengan memisahkan kekayaan dalam bentuk uang atau barang lain.

Menurut Zainul Bahri dalam kamus umum, yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan dengan tujuan sosial.

Menurut Poerwadarminta, yayasan merupakan badan atau gedung yang didirikan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu, seperti badan hukum bermodal tanpa anggota.

Dari definisi diatas yayasan adalah sebuah entitas hukum yang bergerak di bidang sosial, memiliki tujuan sosial, kemanusiaan, dan idealistik, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum dan moralitas.

2.4. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis, "Berdaya" berarti "mampu, kuat, bertenaga," sedangkan "daya" menunjukkan "kemampuan untuk melakukan, kemampuan untuk melakukan kegiatan. Pemberdayaan juga merupakan konsep peningkatan kemampuan atau kekuatan seseorang atau kelompok dalam melakukan kegiatan atau mengambil keputusan yang berdampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Istilah pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata "power" yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Dengan demikian, pemberdayaan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan atau kekuatan individu atau kelompok agar dapat berperan aktif dalam mengambil keputusan dan mengendalikan hidup mereka, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penguatan kapasitas, dan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Melalui pemberdayaan, individu atau kelompok dapat mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan memiliki peran yang aktif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun definisi para ahli terkait pemberdayaan tersebut:

- (Rubin 1992:43) pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk mengarahkan masyarakat, sehingga mereka merasa bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya.
- (Subejo dan supriyanto 2004) Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai tindakan yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat setempat dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya lokal yang mereka miliki melalui kolaborasi dan jaringan kerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan

kemampuan dan kemandirian kepada mereka dalam aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Penting untuk dicatat bahwa pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang terjadi dalam jangka pendek, melainkan merupakan proses yang membutuhkan waktu lama.

- (Marmoah, 2014) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membantu suatu kalangan atau sekelompok orang dari yang sifatnya pasif menjadi aktif dan juga mampu menggerakkan diri dalam masyarakat.
- (Chamber, 1995) Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk menciptakan model pembangunan baru yang berpusat pada masyarakat, inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
- (World bank 2001) Pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kemampuan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki suara (voice) dan menyampaikan pendapat, ide, atau gagasan mereka. Selain itu, pemberdayaan juga melibatkan memberikan kemampuan dan keberanian kepada mereka untuk membuat pilihan (choice) yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian dalam masyarakat.

Istilah pemberdayaan, juga dapat di artikan sebagai Upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan Masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keingannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya ,dll. Selain itu pemberdayaan Masyarakat juga merupakan usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan Masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari jerat keterbelakang dan kemiskinan.

Sehingga Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan yang melibatkan beberapa aspek penting guna meningkatkan potensi serta kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari tiga perspektif yang saling terkait. (soebiato t. m., 2012)

Dalam hal ini, pertama-tama, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan potensi masyarakat. Hal ini menekankan pemahaman bahwa setiap individu dan kelompok memiliki kapasitas yang dapat ditingkatkan. Sebagai langkah awal, menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi potensi ini untuk berkembang menjadi suatu keharusan.

Kedua, pemberdayaan masyarakat melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas atau kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Selain menciptakan suasana yang positif, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memberikan dukungan yang beragam dan peluang akses yang lebih luas kepada masyarakat. Ini akan membantu dalam peningkatan kapabilitas mereka.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, pemberdayaan memerlukan keamanan bagi masyarakat yang terlibat. Sangat penting untuk mencegah segala bentuk penindasan atau peminggiran pihak-pihak yang lebih lemah selama proses pemberdayaan. Oleh karena itu, aspek kunci dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah perlindungan dan bantuan kepada mereka yang rentan.

Dengan Upaya pemberdayaan yang komprehensif dari tiga sisi ini, pemberdayaan masyarakat menjadi suatu proses yang holistik dan memastikan bahwa perkembangan yang terjadi melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Adapun definisi Pendekatan pemberdayaan yang di kemukaan (Sumodinigrat, 2002):

Pertama, upaya pemberdayaan harus memiliki arah yang jelas, yang sering disebut sebagai pemihakan. Artinya, upaya tersebut ditujukan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan, dengan program yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kedua, program pemberdayaan harus melibatkan langsung masyarakat yang menjadi sasaran. Melibatkan mereka memiliki tujuan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan efektif karena sesuai dengan keinginan dan memahami kemampuan serta kebutuhan masyarakat tersebut.

Ketiga, pendekatan kelompok harus digunakan, karena sulit bagi masyarakat miskin untuk memecahkan masalah secara individu. Pendekatan kelompok ini juga lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, karena lingkup bantuan tidak terlalu luas jika ditangani secara individu.

2.1.1. Strategi Pemberdayaan

Setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilandasi dengan strategi kerja yang spesifik agar dapat berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. (soebiato, 2012)

(soebiato, 2012) Tentang hal ini, secara konseptual, strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan, seperti:

1. Strategi sebagai suatu rencana
2. Strategi sebagai kegiatan
3. Strategi sebagai suatu instrument
4. Strategi sebagai suatu sistem
5. Strategi sebagai pola pikir

Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang “penting” yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan. Adapun Strategi pemberdayaan Masyarakat dilihat dari arah pemberdayaan dimana pada dasarnya terdapat tiga arah pemberdayaan, yaitu :

Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;

Kedua, pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat;

Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menyusun instrument pengumpulan data
2. Membangun pemahaman, komitmen untuk membangun kemandirian individu, keluarga dan masyarakat;
3. Mempersiapkan system informasi, megembangkan system analisis, intervensi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat

2.1.2 Aspek Pemberdayaan

Dalam telaahannya (Suharto, 1997) terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, ia mengemukakan adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:

1. Motivasi
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

3. Manajemen diri
4. Mobilisasi sumberdaya
5. Pembangunan dan pengembangan jaringan

Lebih lanjut,dalam kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat, kelima aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui 5P startegi pemberdayaan yang dapat yaitu:

1. Pemungkinan

Menciptakan lingkungan atau situasi yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari hambatan-hambatan kultural dan struktural.

2. Penguatan

Pemberdayaan masyarakat miskin harus dapat menguatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin sehingga mereka dapat menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah,dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus mengarah pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang merugikan masyarakat miskin.

4. Penyongkong

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus bisa menyokong masyarakat kecil agar tidak terjerumus terlalu jauh kedalam situasi yang membuat mereka terpinggirkan dan lemah.

5. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan sehingga setiap individu mendapatkan kesempatan untuk tetap bisa berusaha.

2.1.3 Pemberdayaan Perempuan

Secara konseptual, menurut Moulton dalam Prijono & Prijoko (2002:203) sebagaimana yang dikutip oleh Sri Marmoah, pemberdayaan perempuan merujuk pada pembagian kekuasaan yang adil dengan tujuan mendorong kesadaran dan partisipasi yang lebih besar dari perempuan dalam semua aspek kehidupan. Definisi ini sering dikaitkan dengan gagasan memberikan kekuatan kepada perempuan agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dan meningkatkan eksistensi mereka dalam masyarakat (Marmoah 1014;66).

Sementara itu, menurut Mutawali (2001;12), peran perempuan dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal mencakup peran perempuan dalam keluarga, seperti mendidik dan merawat anak-anak serta menjaga agar keluarga tetap sehat secara fisik dan mental. Sedangkan aspek eksternal melibatkan peran perempuan di luar keluarga, di mana mereka ikut berkontribusi dalam membangun masyarakat sebagai agen pembangunan. Menurut, Tan (1996:26), saat ini perempuan memiliki peluang yang lebih luas. Mereka tidak hanya berperan sebagai anggota keluarga, tetapi juga memiliki peran sebagai individu sosial yang berinteraksi dengan suami, anak-anak, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, peran perempuan dalam pembangunan bangsa fokus pada upaya mengatasi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, partisipasi aktif dalam masyarakat, stabilitas nasional, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengubah distribusi tenaga dalam hubungan interpersonal maupun institusi dalam masyarakat. Perempuan perlu diberdayakan melalui berbagai aspek, termasuk pemberdayaan psikologis, politik, ekonomi, dan kognitif. Pemberdayaan psikologis berhubungan dengan keyakinan dan sikap perempuan terhadap kemampuannya untuk mengubah situasi atau kondisi. Pemberdayaan politik berkaitan dengan kemampuan untuk menganalisis situasi politik dan bergerak menuju perubahan sosial. Pemberdayaan ekonomi melibatkan kemampuan perempuan dalam hal pendapatan dan akses terhadap penghasilan sendiri. Pemberdayaan kognitif menekankan kemampuan perempuan untuk secara kritis menilai pengalaman mereka dan menganalisis kebiasaan dan pola yang dapat mengarah pada ketergantungan dan subordinasi.

2.5. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan yang berstatus janda dan kurang berdaya serta tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dianggap sebagai perempuan rawan sosial

ekonomi. Menurut Dinas Sosial (2015, dalam Fajarwati, Sari, dan Soewarno, 2017), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi didefinisikan sebagai perempuan dewasa, belum menikah atau janda (orang tua tunggal), atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, berusia 18-60 tahun, yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Jika dipertimbangkan dari aspek pemasukan, kita dapat memahami tingkat garis kemiskinan dengan membagi jumlahnya dalam rentang 30 hari. Jika pada bulan Januari 2024 BPS Papua mencatatkan garis kemiskinan sebesar Rp. 1.056.252 per kapita per bulan, dapat dihitung bahwa dengan membagi garis kemiskinan tersebut selama 30 hari, kita akan mendapatkan nilai sekitar Rp. 35.208,4 ribu per hari. Dengan demikian, untuk dapat terbebas dari status penyandang PRSE, seseorang harus memiliki pendapatan di atas angka Rp. 35.208,4 per harinya (Khoirudin, 2019).

Penelitian kontemporer mengungkapkan bahwa perempuan menjadi katup penyelamat bagi keluarga terlebih khusus lagi jika keluarga tersebut tidak memiliki kepala keluarga (suami) maka perempuanlah yang akan mengambil alih peran itu dan memainkan peran ganda yaitu sebagai kepala keluarga dan juga sebagai seorang ibu dalam keluarga tersebut. Diantara peran ganda tersebut masih ada peran-peran lainnya yang masih harus dimainkan lagi oleh perempuan miskin yang mengambil alih peran dalam keluarga (Marwanti & Astuti, 2011), meliputi:

Pertama, Sebagai Pengelola Keuangan Keluarga;

Kedua, Sebagai Penanggung Jawab Seluruh Tugas Rumah Tangga;

Ketiga, Sebagai Pencari Nafkah Keluarga.

Keempat, sebagai simpul jaringan sosial yang vital untuk transfer sosial, terutama pada saat-saat kritis dan bencana.

Faktor yang mendukung seorang perempuan menjadi perempuan rawan sosial ekonomi: (Kwik Kian Gie, 2001)

1. Mengeyam Pendidikan yang rendah (tidak menamatkan SD)
2. Tidak memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai (selain Bertani)
3. Kemiskinan

adapun kriteria Perempuan Rawan sosial ekonomi (Menurut Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 8 Tahun 2012)

1. Perempuan berusia 18 – 59 tahun
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.

3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

2.6 Kondisi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa yang sudah menikah, belum menikah, atau janda yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Kriteria:

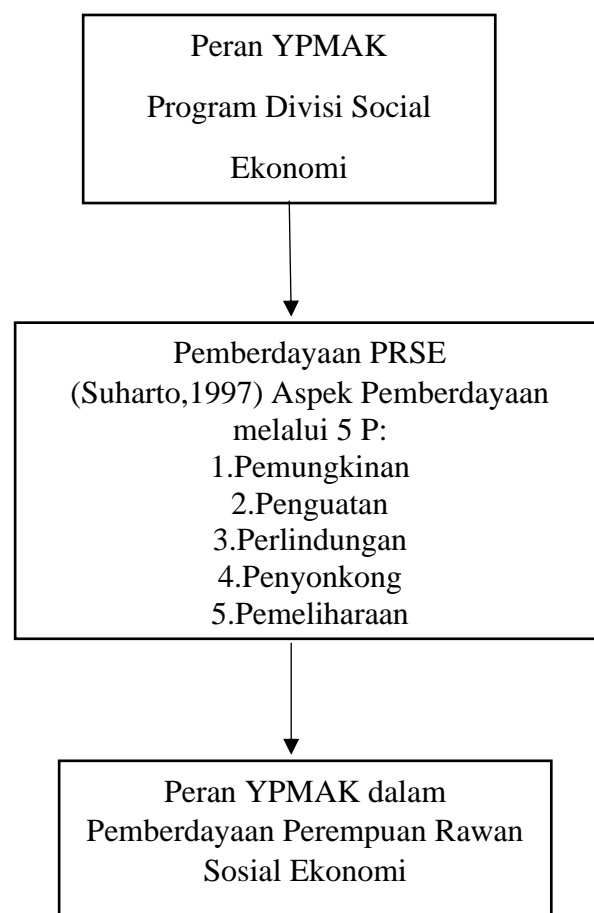
- a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. Istri yang ditinggalkan suami tanpa keterangan;
- c. Menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga; dan
- d. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak.

Dari definisi di atas yang dijelaskan oleh permensos dalam UU no 8 tahun 2012 adalah suatu kondisi yang dialami oleh seorang perempuan dengan rentan usia dari 18 sampai dengan 59 tahun yang menikah ataupun tidak menikah dan memiliki tanggungan dalam keluarga baik sebagai kepala keluarga ataupun sebagai seorang perempuan dewasa yang memiliki peran dalam keluarga untuk membantu perekonomian dalam keluarga tersebut. Biasanya perempuan yang telah menikah dan menjadi pencari nafkah dalam keluarga adalah Perempuan yang menjadi orang tua tunggal, menurut Fahrudin (2012), lebih sulit menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya dibandingkan dengan perempuan yang masih menikah, terutama dalam hal menyelesaikan masalah dan mengurus kebutuhan dasarnya. Ada banyak factor yang menyebabkan perempuan tersebut menjadi pencari nafkah dalam keluarga tersebut di antara lain adalah sang kepala keluarga meninggal dunia, suami pergi meninggalkan tanpa alasan yang jelas, perselingkuhan dan menikah muda yang berujung perceraian. Faktor inilah yang membuat perempuan tersebut harus berusaha memenuhi kebutuhan dalam keluarga meskipun tidak memiliki Pendidikan yang memadai sehingga membuat mereka selalu berada dibawah garis kemiskinan, hal ini pun berlaku pada seorang perempuan yang tidak menikah tetapi memiliki tanggungan dalam keluarga.

Perempuan ini adalah mereka yang ingin mengenyam Pendidikan namun terkendala oleh biaya serta kondisi keluarga dan ekonomi sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah sama

sekali dan mencari pekerjaan yang mengandalakan kemampuan fisik tanpa adanya skill khusus yang dibutuhkan, biasanya pekerjaan ini meliputi buruh serabutan, pedagang pasar, dan perkebunan (perkebunan pribadi atau milik orang lain).Dimana para perempuan tersebut tidak memiliki pendidikan yang layak atau memadai untuk dapat memasuki dunia kerja sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengerjakan segala jenis pekerjaan, sehingga mereka dapat menghasilkan uang agar kebutuhan dalam keluarga mereka dapat terpenuhi.Meskipun tak jarang atau bahkan penghasilan yang mereka dapatkan tidak dapat menutupi kebutuhan dalam keluarga tersebut, hal ini biasanya terjadi apabila dalam keluarga tersebut memiliki banyak anggota keluarga yang tidak memiliki pekerjaan dan hanya bertumpu hidup pada seorang perempuan rawan social ekonomi.

2.7 Kerangka Pikir



Divisi Sosial Ekonomi yang berada di Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAMK) merupakan salah satu divisi dari tiga divisi utama yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat divisi ini memfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi. Dimana peneliti ingin melihat bagaimana peran YPMAMK melalui divisi ini untuk memberdayakan masyarakat terkhususnya perempuan rawan sosial ekonomi, dengan menjalankan program pada divisi tersebut, dengan mengacu pada aspek pemberdayaan yang dikembangkan oleh Suharto (1997). Aspek tersebut meliputi aspek Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Aspek Pemungkinan mencakup upaya menciptakan lingkungan yang mendukung agar perempuan memiliki akses ke peluang ekonomi. Penguatan berfokus pada peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan agar mereka bisa lebih mandiri. Perlindungan mencakup tindakan untuk memastikan perempuan rawan sosial ekonomi mendapatkan peluang dan kepercayaan dari pihak ketiga untuk membantu mereka dalam mengelola keuangan dan mendapatkan modal usaha, sementara Penyokongan berarti memberikan dukungan, baik finansial maupun non-finansial, untuk membantu keberlanjutan usaha perempuan. Terakhir, Pemeliharaan menitikberatkan pada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak positif dari program pemberdayaan ini. Dengan mengintegrasikan kelima aspek ini, YPMAMK berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi di wilayah Timika, Papua.